

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2018, Renja Tahun 2018, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 188.45/018/DPMPTSP/2018, Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1. Persentasi Peningkatan jlh Investasi	Persen	5 M	507 M	101,4
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	2.IKM	Persen	83,66	83	99,21

Dari tabel diatas, tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.2

**Capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Persentase
Tahun 2018**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	1

Berdasarkan tabel diatas diketahui :

1. 1 (satu) indikator tidak mencapai target (kurang dari 100%)
2. 0 (nol) indikator sesuai target (100%)
3. 1 (satu) indikator melampaui target (lebih dari 100%)

Capaian indikator berdasarkan klasifikasi kategori dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3

**Capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Kategori
Tahun 2018**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Hasil pengukuran berdasarkan Sasaran Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.4
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2018

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	101,4 %	Melebihi Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1	99,21 %	Tidak Tercapai

Pada tabel diatas diketahui bahwa terdapat :

1. 1 (satu) sasaran stratedgis melebihi target
2. 0 (nol) sasaran strategis sesuai target; dan
3. 1 (satu) sasaran strategis tidak mencapai target

Tabel 3.1.5
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Kategori Tahun 2018

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja	0 – 49,99 Sangat Kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	>90 Sangat Baik
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	101,4					101,4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1	99,21					99,21

Tabel 3.1.6
Pencapaian Target Sasaran Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2018

Sasaran	Jumlah Indikator	Tingkat Pencapaian					
		Melebihi Target (>100)		Sesuai Target (=100)		Dibawah Target (<100)	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	1	101,4				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1					1	99,21

Berdasarkan tabel diatas, capaian target sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 masuk dalam kategori sangat baik.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Sesuai ketentuan tersebut, Pelaporan Kinerja ini dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor :

188.45/018/DPMPTSP/2018, Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Rencana Sasaran Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/243/KUM/2018, Tanggal 4 Jun 2018, tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan rincian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH (PMDN/PMA)

Sasaran “Meningkatnya Investasi Daerah” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian MISI 2 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Perekonomian,” pada sasaran strategis ke 5, yaitu “Meningkatnya pendapatan daerah dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal,” dengan indikator “Pertumbuhan ekonomi”.

Untuk upaya pencapaian sasaran ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan indikator “Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)”.

“Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)” adalah nilai investasi yang dicapai dibagi dengan nilai investasi tahun berjalan dikali seratus persen berupa Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing, dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Nilai Investasi yg dicapai}}{\text{Nilai Investasi Tahun berjalan}} \times 100 \%$$

Capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2018

Indikator Kinerja Utama “Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)” berdasarkan Renstra 2017-2022, Tahun 2018 ditargetkan 5 M Berdasarkan usulan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Barito Kuala.

Maka capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah 101,4 % (507 M / 5 M X 100)

Tabel 3.2.1
Perbandingan Target dan Realisasi IKU
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	5 M	507 M	101,4 %

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun

Lalu/Kondisi Awal Renstra.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA) Tahun 2018 dibanding dengan kondisi awal Renstra, dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2018	Kondisi Awal Renstra	%
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDM/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	507 M	4.912.757.286.736	1,032

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2018-2022

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018 dan Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	2018			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap (2022)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	4.912.757.286.736	5 M	507 M	101,4	2.005.000.000.000	0,253

4. Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.

Tercapainya target yang didapat karena adanya kesadaran dari pelaku usaha yang secara kontinyu dan konsisten untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya.

5. Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Untuk mendukung pencapaian target Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA) dialokasikan dana dalam DPA Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 sebesar Rp. 53.937.435.- telah terealisasi Rp. 52.857.750.- (98 %).
 Sehingga terdapat efisiensi sebesar 2 % (100 % - 98 %)

Tabel 3.2.3
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	($\leq 100\%$)	98	2

6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)” dengan Indikator Kinerja Utama “Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)”, dituangkan dalam :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

dengan kegiatan :

a. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, yaitu : melakukan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, yaitu :

melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

2. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah, yaitu :
melakukan penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian MISI 2 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Perekonomian,” pada sasaran strategis ke- 5, yaitu “Meningkatnya pendapatan daerah dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal,” dengan indikator “Pertumbuhan ekonomi”.

Untuk upaya pencapaian sasaran ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan indikator “indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”.

“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” adalah jumlah masyarakat yang merasa puas dibagi dengan jumlah masyarakat yang di layani dikali seratus persen dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jlh Masy. Yg merasa puas}}{\text{Jlh Masy. Yg dilayani}} \times 100 \%$$

Capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2018

Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” berdasarkan Renstra 2017-2022, Tahun 2018 ditargetkan 83,66. Berdasarkan usulan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Barito Kuala.

Maka capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah 99,21 % ($83,66 / 83 \times 100$)

Tabel 3.2.4
Perbandingan Target dan Realisasi IKU
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,66	83	99,21 %

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun

Lalu/Kondisi Awal Renstra.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018 dibanding dengan kondisi awal Renstra, dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2018	Kondisi Awal Renstra	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	83,66	99,21

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2018-2022

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018 dan Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	2018			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap (2022)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,66	83,66	83	99,21	84,99	0,98

4. Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.

Belum tercapainya target yang didapat karena indikator pilihan responden hanya ada 2 pilihan sehingga nilai yang dicapai tidak memenuhi target.

5. Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Untuk mendukung pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dialokasikan dana dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 sebesar Rp. 32.623.200.- telah terealisasi Rp. 32.559.380.- (99,80 %).

Sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,2 % (100 % - 99,80 %)

Tabel 3.2.6
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	($\leq 100\%$)	99,80	0,2

6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan” dengan Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, dituangkan dalam :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik

dengan kegiatan :

- a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu : melakukan atau membagikan kuisioner indeks kepuasan masyarakat kepada pemohon perizinan
- b. Monitoring dan Evaluasi Perizinan, yaitu : melakukan kegiatan evaluasi atas hasil dari kuisioner indeks kepuasan masyarakat yang telah dikumpulkan

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 2.541.010.185.- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.478.826.461.- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,76 %.

Komposisi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Anggaran 2018
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	903.177.500.-	849.295.088.-	94,03
2	Belanja Tidak Langsung	1.637.832.685.-	1.629.531.373.-	99,49
Jumlah		2.541.010.185.-	2.478.826.461.-	96,76

Sumber RFK dan DPA Perubahan Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 94,03 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2018, dan sisanya sebesar 99,49 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.541.010.185.- dengan realisasi sebesar Rp. 2.478.826.461.- atau 96,76 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis

**dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Sasaran 1	257.215.550.-	250.942.814.-	97,56
2	Sasaran 2	39.762.435.-	39.182.750.-	98,54
	Jumlah	296.977.985.-	290.125.564.-	98,05

Sumber: RFK dan DPA Perubahan Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018.

Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2018, Realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja Program/Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Berisi penyediaan : jasa surat menyurat, jasa komunikasi, jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Berisikan pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Berisi pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Berisi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Berisi penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
6. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Berisi penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah.
7. Program Peningkatan Pelayanan Publik
Berisikan peningkatan wawasan aparatur Kantor Pelayanan Terpadu, Pendataan Perijinan, Pemeriksaan dan pengecekan lapangan pemohon perijinan, Survey indeks kepuasan masyarakat, Sosialisasi perijinan, Monitoring dan evaluasi perijinan.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	100	54.067.450	98,73
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1	99,67	250.942.814	97,56
	Jumlah	2	99,83	256.410.264	98,14

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2018 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 10 (sepuluh) sasaran menunjukkan pencapaian antara 100 s.d 188,28 % yaitu sebanyak 9 (sembilan) sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	100	98,73	1,27
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1	99,67	97,56	2,27
	Jumlah	2	99,83	98,14	1,69